

REKONSILIASI ARAB SAUDI DAN IRAN DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

Ahmad Zainal Mustofa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
m.ahmadzainal@gmail.com

Abstract

This article describes the reconciliation between Saudi Arabia and Iran that recently occurred. This study aims to explore more deeply related to how the relationship between Saudi Arabia and Iran is post-reconciliation. Then, revealing China's interests as an actor mediating Saudi-Iran. The writer uses constructivism theory as a tool to analyze the discussion. Then the author uses a qualitative type method with a literature study approach. This research concludes that reconciliation between Saudi Arabia and Iran through Chinese mediation succeeded in reuniting the two countries which were often involved in tensions for a long time. This reconciliation also has an impact on the political constellation in the Middle East where countries in alliance with Saudi and Iran will be softer towards countries that are considered enemies. Then, China has an interest in increasing its economic sector in the Middle East such as the BRI policy, especially with Saudi-Iran. Then China expects maximum support from Middle East and North Africa (MENA) countries in international forums. Furthermore, China seeks to compete with the United States as a threat in the field of security through its presence in the Middle East as a party capable of giving hope for peace.

Keywords: Saudi Arabia-Iran Reconciliation, Political Constellation, BRI, China's Interests

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang rekonsiliasi terhadap hubungan Arab Saudi dan Iran yang belum lama ini terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait bagaimana hubungan Arab Saudi-Iran pasca rekonsiliasi. Kemudian, mengungkap kepentingan China sebagai aktor yang melakukan mediasi terhadap Saudi-Iran. Penulis menggunakan teori konstruktivisme sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil yang diperoleh bahwa rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran melalui mediasi China berhasil menyatukan kembali kedua negara yang sering

terlibat ketegangan dalam waktu yang lama. Hal ini berdampak terhadap konstelasi politik di Timur Tengah yang mana negara-negara yang beraliansi dengan Saudi dan Iran akan lebih soft terhadap negara yang dianggap musuh. Kemudian, China memiliki kepentingan untuk meningkatkan sektor perekonomiannya dan mengharapkan dukungan maksimal dari negara-negara Middle East and North Africa (MENA) dalam forum internasional. China juga menyaingi Amerika Serikat sebagai ancaman di bidang keamanan melalui kehadirannya di Timur Tengah sebagai pihak yang mampu memberi harapan perdamaian.

Kata kunci: Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran, Konstelasi Politik, BRI, Kepentingan China

Article History: Received 22 July 2023, Revised: 15 August 2023, Accepted: 01 November 2023, Available online 30 December 2023

Pendahuluan

Arab Saudi dan Iran adalah dua kekuatan besar di Timur Tengah dan telah terlibat dalam persaingan sengit selama bertahun-tahun. Salah satu hambatan terbesar untuk mencairkan hubungan adalah perpecahan sektarian antara kedua negara, dengan Arab Saudi mewakili Sunni dan Iran mewakili Syiah. Iran menuduh Arab Saudi sebagai pion Barat dan mengkritik hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat. Iran juga telah membangun jaringan milisi bersenjata di seluruh wilayah untuk meningkatkan keamanan dan pengaruhnya, yang dilihat Arab Saudi sebagai ancaman terhadap stabilitas regional (Sinha, 2023).

Pada 10 Maret 2023, berita pemulihan hubungan diplomatik antara kekuatan regional Arab Saudi dan Iran mengejutkan beberapa pengamat politik regional. Setelah pecah tujuh tahun sejak 2016, pembukaan kembali kedutaan masing-masing menandai salah satu pergeseran diplomatik regional yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun kesepakatan yang ditengahi China antara Arab Saudi dan Iran mungkin tidak seheboh kelihatannya, kesepakatan tersebut tidak diragukan lagi meninggalkan bekas di garis konflik kawasan. Menyusul pengumuman pemulihan hubungan diplomatik antara Riyadh dan Teheran, Arab Saudi dan Suriah juga setuju untuk membuka kembali kedutaan mereka, setelah

memutuskan hubungan diplomatik mereka lebih dari satu dekade lalu (Battaloglu, 2023).

Pasca rekonsiliasi tersebut, Iran dan Arab Saudi mengumumkan dimulainya kembali hubungan dan kembalinya duta besar ke Riyadh dan Teheran. Sebagai bagian dari komitmen yang mereka sepakati, Riyadh dan Teheran setuju untuk menghormati perjanjian sebelumnya untuk menghindari campur tangan urusan dalam negeri dan terlibat dalam negosiasi ekstensif pada semua masalah bilateral dan regional. Dalam hal ini penekanan utama pada keamanan dan stabilitas di kawasan (Shine, Guzansky, & Shavit, 2023). Sebagaimana diketahui bahwasanya hubungan Arab Saudi dan Iran mengalami pasang surut. Terlebih pasca *Arab Spring*, Arab Saudi dan Iran juga terlibat *proxy war* dalam perang saudara yang terjadi di Yaman. Konflik ini bukan hanya sekadar motif ekonomi maupun militer, namun juga tentang dua ideologi yang berbeda di mana Saudi merupakan representasi Sunni dan Iran merupakan representasi dari Syiah. Kedua negara ini berusaha membangun dukungan untuk melegitimasi kekuatan mereka di Timur Tengah (Machmudi, 2020).

Yaman adalah negara yang paling terpengaruh oleh persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Persaingan Iran-Arab Saudi memiliki dinamika geopolitik di luar perbedaan sektarian (Sari, 2023). Mengenai Arab Saudi, Iran terus menekan Riyadh dari Yaman dan Irak. Sebuah laporan resmi mendokumentasikan 430 serangan rudal serta 851 serangan pesawat tak berawak dari Houthi yang dipanggang Iran di Arab Saudi sejak 2015 (Bakir, 2022). Begitupun konflik yang terjadi di Suriah, di mana Riyadh mendukung pemberontak dan Iran mendukung pemerintahnya yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Saudi beranggapan bahwa kediktatoran harus dihapuskan dan diganti oleh sistem demokrasi yang menghormati nilai hak asasi manusia. Maka dari itu, *proxy war* di Suriah tidak bisa dihindarkan (Oktorino, 2015).

Arab Saudi dan Iran merupakan dua kekuatan besar yang mendominasi regional Timur Tengah. Rivalitas kedua negara tersebut seringkali terjadi, setidaknya ketika *Arab Spring* melanda Timur Tengah. Saudi dan Iran sering terlibat pertempuran tidak langsung untuk mengamankan kepentingan mereka beserta aliansinya di dataran Arab. Hal ini juga memicu kekhawatiran dunia akan terjadinya perang besar di Timur Tengah seperti perang Iran-Irak pada tahun 1980an lalu. Adanya rekonsiliasi ini membawa harapan baru bagi konstelasi politik di Teluk Persia.

Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi menjauh dari jalannya pemulihan hubungan dengan Israel dan merangkul Iran, sehingga mengikis posisi geostrategis Israel di Timur Tengah. Perjanjian antara Republik Islam Iran dan Kerajaan Arab Saudi menyebabkan kekhawatiran besar di Israel. Dengan mundur dari gerakannya menuju pemulihan hubungan dengan Israel dan sebaliknya menghangatkan hubungan dengan Teheran, Riyadh dianggap telah mengikis posisi geostrategis Israel di Timur Tengah. Bahkan ketika Israel muncul di ambang kesepakatan dengan Riyadh, keuntungan paling nyata bagi Yerusalem sehubungan dengan penahanan Iran adalah kemungkinan pembukaan wilayah udara Saudi ke angkatan udara Israel untuk memfasilitasi kemungkinan serangan terhadap Iran (Castro, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa isu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstelasi politik dan hubungan Saudi dan Iran pasca rekonsiliasi. Kemudian mengetahui terkait apa kepentingan China terhadap rekonsiliasi Saudi-Iran. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat konstelasi politik di Timur Tengah begitu dinamis baik dari sisi regional maupun global.

Penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berbasis literatur. Hal ini bertujuan guna mencari pengertian tentang fakta dan realita

dalam suatu penelitian kemudian dianalisis secara proporsional (Raco, 2020). Analisis dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap dokumen yang berfungsi sebagai sumber data. Adapun dokumen-dokumen yang dapat dianalisis ialah buku, artikel ilmiah/jurnal, makalah dan lain sebagainya. Tujuan dari analisis tersebut yaitu mengetahui kedudukan dan hubungan antara beberapa hal yang relevan seperti, kebijakan, kegiatan, peristiwa yang menjadi objek penelitian serta manfaat atau hasil dari hal-hal tersebut (Hardani, et al., 2020).

Penulis mengambil sumber-sumber yang memiliki relevansi utama sebagai kajian literatur. Adapun kajian literatur tersebut berupa jurnal dan buku seperti: “Iran and Saudi Arabia: Religious and Strategic Rivalry”, “Iran and Saudi Arabia Renew Relations, Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia”, dan sebagainya. Tidak hanya itu, sebagai kajian literatur lainnya penulis juga mengambil sumber dari web seperti: “www.spa.gov.sa”, “www.fmprc.gov.cn”, “en.mfa.ir”, dan lain sebagainya. Semua sumber yang relevan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai baik dari aspek esensial maupun juga aspek substansial.

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis Hubungan Internasional yang mulai populer sejak dekade 1990an setelah Perang Dingin berakhir (Wicaksana, 2016). Alexander Wendt yang merupakan salah satu dari banyaknya tokoh yang mendalami ilmu hubungan internasional mengatakan bahwa teori konstruktivis merupakan teori struktural yang memiliki klaim utama sebagai berikut:

1. Negara adalah unit analisis prinsip dalam teori politik internasional.
2. Struktur kunci dari sistem negara dalam skala global lebih bersifat intersubjektif daripada material.

3. Kepentingan dan identitas negara merupakan bagian penting yang dibangun oleh struktur sosial mereka.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, negara-negara membentuk gagasan dan memahami dunia di sekitar mereka berdasarkan struktur-struktur dengan mana mereka berinteraksi, dan kemudian mereka bertindak atas dasar persepsi yang mereka bentuk (Bakry, 2017).

Konstruktivis menggunakan gagasan tentang identitas, yang digambarkan secara sosial dan logis sebelum kepentingan, mewarisi wawasan konstruktivis sosiologis yang menyoroti proses sosial yang mendasari identitas individu, dan menerapkannya pada hubungan internasional (Dormer, 2017). Isu sentral lain untuk konstruktivisme adalah identitas dan kepentingan. Konstruktivis berpendapat bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor yang lain. Identitas adalah representasi dari pemahaman aktor tentang siapa mereka, yang pada gilirannya menandakan kepentingan mereka (Theys, 2018). Identitas diperlukan baik dalam politik internasional maupun masyarakat domestik. Identitas negara menyiratkan preferensi dan tindakan konsekuennya. Suatu negara memahami orang lain sesuai dengan identitas yang diatribusikan kepada mereka, sekaligus mereproduksi identitasnya sendiri melalui praktik sosial sehari-hari. Konstruktivisme menekankan bahwa proposisi ini membebaskan diri dari teorisasi dasar-dasar kehidupan politik internasional, sifat dan definisi aktor (Hopf, 1998).

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwasanya isu utama dari konstruktivisme adalah identitas dan kepentingan. Dalam *case study* Arab Saudi-Iran, kedua negara ini dari sisi ideologi memiliki pandangan yang berbeda yaitu Sunni-Syiah. Selain itu, sistem pemerintahan juga memiliki identitas tersendiri yang mana Saudi dengan monarkinya sedangkan Iran dengan teokrasinya. Perbedaan tersebut membawa kedua negara kepada rivalitas di Timur Tengah. Di samping itu, perlombaan

dominasi di kawasan juga mewarnai ketegangan antara Saudi-Iran sebelum akhirnya melakukan rekonsiliasi. Lalu, dalam aspek kepentingan baik Saudi-Iran tentu saja memiliki kalkulasi *cost and benefit* dalam menormalisasi hubungan mereka. Kemudian kepentingan China yang menjadi aktor dalam rekonsiliasi Saudi-Iran juga menjadi daya tarik baru dalam konstelasi politik Timur Tengah.

Hubungan Arab Saudi-Iran: Identitas dan Realitas

Sejak revolusi Iran tahun 1979, sentimen anti-Persia yang meningkat membuat Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah berupaya merebut kembali wilayah tersebut. Hal tersebut dipicu oleh perpecahan Syiah-Sunni dan ketakutan Iran akan mengeksport model Syiah teokratis Ayatollah Ruhollah Khomeini ke negara-negara tetangga Arab lainnya. Permusuhan ini mengakibatkan konfrontasi yang dimulai dengan perang Irak-Iran tahun 1980, perang proksi di Yaman, Lebanon, dan Suriah pasca Arab Spring 2010-2011. Meskipun kedekatan geografis membuat hubungan perdagangan yang berkelanjutan antara negara-negara Teluk dan Iran menjadi suatu kebutuhan, sentimen Arab terhadap Iran tetap negatif. Uni Emirat Arab (UEA) misalnya, merupakan mitra dagang terbesar kedua Iran dengan komoditas senilai \$14,28 miliar yang diperdagangkan pada tahun 2021, sekaligus menjadi salah satu musuh terberatnya atas sengketa teritorial yang berlangsung lama (Zaaimi, n.d.).

Situasi Timur Tengah sangat kompleks dan arus rekonsiliasi pun sangat berharga. Sejumlah analis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hasil yang didorong bersama faktor internal dan eksternal. Dilihat dari faktor internal, rakyat Timur Tengah sudah menderita perang dalam jangka waktu yang panjang. Mereka punya keinginan keras terhadap perdamaian. Dilihat dari faktor eksternal beberapa tahun lalu, Amerika Serikat mempercepat pelarian diri dari Timur Tengah dan mengalihkan perhatian serta sumber dayanya ke Asia Pasifik. Sejumlah besar negara-negara Timur Tengah

berpendapat bahwa Washington telah membuang komitmen keamanan tradisional kepada negara sekutunya. Kesadaran negara-negara Timur Tengah untuk mengupayakan independen strategis telah ditingkatkan secara nyata pasca sikap AS tersebut (indonesia.cri.cn, 2023).

Revolusi Iran 1979 secara substansial mengubah lingkungan politik Teluk Persia dengan membalikkan kebijakan dua pilar Amerika Serikat yang mengandalkan Iran dan Arab Saudi untuk mengelola keamanan regional. Arab Saudi telah mewaspadaikan Iran dan kebijakan regionalnya. Kekhawatiran ini dikarenakan penggantian monarki Iran dengan republik teokratis Syiah. Pergantian tersebut menimbulkan atensi keluarga kerajaan Sunni Teluk Arab yang menyadari potensi ideologi revolusioner antimonarki dan Islam dapat menyebar dan dilegitimasi secara agama ada di kawasan Arab. Para pemimpin Arab Saudi menganggap ini sebagai ancaman besar.

Ketegangan yang selama ini terjadi antara Saudi-Iran berkisar pada tiga isu besar, yaitu (Litvak, 2017):

1. Persaingan atas tatanan regional. Iran melihat dirinya sebagai kekuatan regional yang alami mengingat ukuran, populasi, dan warisan sejarahnya. Arab Saudi menganggap dirinya sebagai pemimpin alami dari sisi Arab di Teluk. Penentangan keras Iran terhadap kehadiran militer AS di wilayah tersebut serta ancaman yang dirasakan terhadap keamanan Iran dari aliansi Saudi-AS menambah ketegangan ini.
2. Serangkaian sengketa perbatasan darat dan laut. Hal ini diilustrasikan oleh klaim Iran atas ladang minyak Bahrain dan Kuwait, dan atas tiga pulau, Tunbs Besar dan Kecil dan Abu Musa di Teluk Persia.
3. Persaingan ekonomi atas harga minyak. Iran, karena populasinya yang lebih besar namun cadangan minyak yang lebih sedikit mencari harga minyak yang lebih tinggi

terlepas dari dampaknya terhadap perkembangan jangka panjang pasar energi global.

Pendekatan politik-ideologi menyoroti model pemerintahan Iran dan Arab Saudi yang saling bersaing dengan masing-masing mengklaim legitimasi Islam dan memiliki visi yang bertentangan tentang tatanan regional. Sistem Iran membenci pemerintahan monarki karena secara inheren tidak Islami dan telah mengabadikan kepemimpinan otoritas agama dalam politik. Meskipun otoriter, Iran telah memberi suara kepada rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan. Karakteristik ini berlawanan dengan sistem monarki Saudi dan kebijakan dalam negeri.

Para pemimpin Saudi khawatir bahwa komunitas Syiah di provinsi-provinsi timur kerajaan yang kaya minyak menjadi semakin dekat dengan rezim Iran. Hal ini bisa memicu kerusuhan domestik dan ancaman langsung terhadap kekuatan Saudi. Namun secara lebih umum, para pemimpin di Riyadh khawatir bahwa ambisi Iran untuk memimpin semua Muslim dapat berdampak pada pengaruh Saudi di luar negeri dan legitimasi di dalam negeri. Iran, sebagai negara yang ingin mengeksplor versi pemerintahannya, yaitu Republik Islam, bertindak sebagai ancaman langsung terhadap sistem pemerintahan Saudi. Dalam beberapa dekade setelah revolusi Iran, hubungan Saudi-Iran telah menjadi contoh persaingan regional yang berkepanjangan, terutama setelah tahun 2003 ketika invasi pimpinan AS ke Irak menyingkirkan Bagdad sebagai pesaing potensial untuk hegemoni regional.

Dengan munculnya serangkaian pemberontakan dan protes di Timur Tengah pada tahun 2011, hubungan antara Teheran dan Riyadh semakin memburuk. Para pemimpin Saudi semakin khawatir bahwa Iran akan mengeksploitasi sentimen anti-rezim di seluruh wilayah untuk memicu ketidakstabilan dan menabur kekacauan di negara-negara Arab. Secara khusus, ketakutan akan kebangkitan Syiah di kawasan Arab dan kedekatan dengan Iran semakin meningkat. Secara eksplisit, ketika protes meletus

di mayoritas Syiah Bahrain, Riyadh dengan cepat mengirimkan pasukan militer untuk melindungi rezim Sunni Al-Khalifa dari kerusuhan domestik (Houghton, 2022).

Hubungan Saudi-Iran semakin memburuk pada 2015 menyusul intervensi Arab Saudi dan UEA dalam perang Yaman, setelah gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dan merebut menguasai ibu kota Sana'a. Arab Saudi menuduh Iran memberikan senjata kepada Houthi, yang menyerang kota-kota Saudi dengan *drone* bersenjata dan rudal balistik. Ketegangan antara dua rival regional tersebut telah memicu konflik di seluruh wilayah, termasuk perang sipil Suriah (middleeastmonitor.com, 2023). Pada tahun 2016, hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi sekali lagi terputus setelah eksekusi ulama Syiah Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr. Keadaan semakin tidak terkendali ketika massa melakukan pembalasan dengan menyerbu kedutaan Saudi di Teheran oleh para pengunjuk rasa. Ketegangan terus berlanjut, serangan rudal terhadap fasilitas minyak Saudi pada akhir 2019 yang berasal dari Yaman menaikkan tensi ketegangan keduanya. Riyadh menyatakan bahwa Teheran yang harus disalahkan dan bertanggung jawab (Shine, Guzansky, & Shavit, 2023).

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hubungan Arab Saudi-Iran memang mengalami pasang surut dan cukup menarik atensi kawasan regional maupun global. Memang, sejak Revolusi Iran 1979, Riyadh sangat khawatir terhadap ideologi revolusioner Syiah dapat menginvasi wilayahnya secara khusus dan Timur Tengah secara umum. Kekhawatiran inilah yang selanjutnya membawa kedua negara ini terlibat dalam rivalitas dominasi di Timur Tengah. Seperti halnya konflik di Irak 1980, Arab Spring 2010-2011 hingga eksekusi ulama Syiah Iran yang disusul dengan serbuan terhadap kedutaan Saudi di Iran pada 2016. Peristiwa demi peristiwa tersebut tentu saja bukan sesuatu yang diharapkan oleh Saudi maupun Iran, biar

bagaimanapun jauh sebelum revolusi Iran 1979, kedua negara ini memiliki hubungan yang baik.

Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran

Pada awal Desember 2022, Presiden China Xi Jinping pergi ke Riyadh untuk pertemuan puncak China-Arab yang pertama. Pada pertemuan ini, Beijing menawarkan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan Saudi-Iran dengan tujuan mengadakan dialog Teluk-Iran di China pada tahun 2023. Kemudian, pada tanggal 14-16 Februari 2023, China juga membahas rencana untuk melanjutkan pembicaraan bilateral dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi selama kunjungannya ke Beijing. Kesepakatan antara Iran dan Arab Saudi untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh merupakan pencapaian yang signifikan. Dalam pembicaraan yang disponsori oleh China, dengan bantuan penting sebelumnya dari Irak dan Oman, kedua negara mencapai kesepakatan yang menjanjikan untuk menurunkan ketegangan yang meningkat antara kedua negara (crisisgroup.org, n.d.).

Berangkat dari keinginan bersama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka melalui dialog dan diplomasi, dan mengingat ikatan persaudaraan mereka; Mengikuti prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta konvensi dan norma internasional; Delegasi dari kedua negara mengadakan pembicaraan pada 6-10 Maret 2023 di Beijing - delegasi Kerajaan Arab Saudi dipimpin oleh Yang Mulia Dr. Mosaad bin Mohammed Al-Aiban, Menteri Negara, Anggota Dewan Menteri, dan Penasihat Keamanan Nasional, dan delegasi Republik Islam Iran dipimpin oleh Yang Mulia Laksamana Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran. Kedua belah pihak juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih mereka kepada kepemimpinan dan pemerintah China yang telah menjadi tuan rumah dan mensponsori pembicaraan, dan upaya yang mereka lakukan untuk keberhasilannya. Ketiga negara mengumumkan

bahwa kesepakatan telah dicapai antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran, yang mencakup kesepakatan untuk melanjutkan hubungan diplomatik antara mereka dan membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam waktu tidak lebih dari dua bulan, dan perjanjian tersebut mencakup penegasan mereka tentang penghormatan terhadap kedaulatan negara dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara. Mereka juga sepakat bahwa para menteri luar negeri kedua negara akan bertemu untuk melaksanakan hal ini, mengatur kepulangan duta besar mereka, dan membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan bilateral (fmprc.gov.cn, 2023).

Pernyataan Trilateral Bersama, sebagaimana kesepakatan itu diketahui menjabarkan jadwal untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh termasuk pertukaran duta besar. Pernyataan yang ditandatangani oleh penasihat keamanan nasional Saudi, MUSAAD bin MOHAMMED AL AIBAN, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, ALI SHAMKHANI, dan direktur Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, WANG YI, memerintahkan masing-masing dari kedua belah pihak untuk menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri pihak yang lain. Kemudian memperbarui hubungan dan membuka kembali kedutaan. Hal ini juga mengikat kembali mereka pada dua perjanjian sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 1998 dan 2001. Pertama mencakup janji perdagangan dan investasi yang lebih besar serta kerja sama di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, olahraga, dan kepemudaan. Kedua menyediakan badan keamanan dan intelijen Iran dan Saudi untuk bekerja sama dalam memerangi berbagai ancaman, termasuk kelompok teroris yang dihadapi kedua negara (crisisgroup.org, n.d.). WANG YI mengatakan bahwa dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran merupakan kemenangan untuk dialog dan perdamaian (spa.gov.sa, n.d.).

Keberhasilan China dalam memediasi Arab Saudi dan Iran ini dianggap oleh Stephen Walt sebagai keberhasilan Beijing atas eksistensinya di Timur Tengah dan dalam menjaga hubungan baik di kawasan tersebut. Sebagaimana pernyataannya (Walt, n.d.):

"China's role in mediating a detente between Iran and Saudi Arabia highlights a long-standing flaw in U.S. Middle East policy. China has cordial relations with every country in the Middle East, which gives every state in the region an incentive to stay on good terms with Beijing and enhances China's leverage. The United States, by contrast, has "special relationships" with some countries and no relations at all with others (such as Iran). The result: America's clients take its support for granted and America's adversaries have no reason to adjust their behavior. If the U.S. wants to compete effectively with a rising China, it should adopt a more realistic and evenhanded approach to diplomacy."

Pertemuan bilateral dan pembicaraan antara menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Arab Saudi berlangsung di Beijing berjalan dalam suasana yang positif dan konstruktif. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian menegaskan bahwa hubungan legal-formal antara Teheran dan Riyadh resmi dilanjutkan mulai 6 April 2023. Sesuai diskusi yang diadakan dan pesan yang dipertukarkan antara Raja Arab Saudi dan Presiden Iran, para pemimpin kedua negara bertekad untuk mengembangkan dan memperdalam hubungan bilateral. Iran siap untuk mengembangkan hubungan dengan Arab Saudi di semua bidang kepentingan seperti ekonomi dan perdagangan serta investasi. Posisi geopolitik Iran memberi Arab Saudi dan negara-negara Teluk Persia peluang unik untuk kerja sama komersial dengan negara-negara di utara Iran (en.mfa.ir, n.d.). Republik Islam Iran telah membuat persiapan yang diperlukan untuk pembukaan resmi misi politik dan konsulernya di Arab Saudi. Sementara itu, Saudi menekankan pandangan positif Riyadh

tentang masa depan hubungan antara kedua negara dan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sisi bilateral (en.mfa.ir, n.d.).

Merujuk pada pembukaan lembaran baru dalam hubungan kedua negara dan prospek baru dalam hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Iran dan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan menekankan kesiapan negaranya untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah ada antara kedua negara. Faisal mengatakan hubungan baru antara kedua negara menciptakan suasana positif baru di seluruh kawasan. Arab Saudi siap memperkuat suasana positif dalam hubungan regional dengan bantuan dan kerja sama Iran. Dalam pertemuan tersebut, para pihak menyepakati pertukaran delegasi persiapan pembukaan kembali kedutaan dan konsulat kedua negara, pengaktifan perjanjian bersama dan pertukaran delegasi guna mengembangkan hubungan di berbagai bidang (en.mfa.ir, n.d.).

Pada tanggal 6 Juni 2023, Iran resmi membuka kembali kedutaannya di Arab Saudi. Hal ini menandai tonggak sejarah lain untuk memulihkan hubungan dan menurunkan ketegangan antara tetangga Teluk. Hal ini tentu akan meningkatkan hubungan Iran-Saudi melihat tujuh tahun lamanya hubungan diplomatik kedua negara terputus dalam persaingan yang bergema di seluruh wilayah. Kedutaan yang dibuka kembali dapat memudahkan perjalanan antar negara saat mereka bekerja untuk melanjutkan penerbangan langsung, meningkatkan perdagangan, dan memulihkan hubungan bisnis. Meskipun Arab Saudi belum membuka kembali kedutaannya di Teheran, jemaah haji Iran akan dapat mengajukan permohonan visa Saudi untuk haji dan umrah yang lebih kecil ke Mekkah dengan lebih mudah, setelah hubungan pulih sepenuhnya (Batrawy, 2023).

Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh China ini menawarkan harapan baru bagi perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah. Setelah melalui berbagai proses,

rekonsiliasi ini membuka kembali keran diplomasi antara Saudi-Iran yang dilakukan dengan membuka kembali kedutaan besar kedua negara. Selain itu, rekonsiliasi ini juga memiliki arti penting dalam aspek politik dan perekonomian. Secara politik, rekonsiliasi ini akan memudahkan kedua negara dalam menjalin komunikasi bilateral terkait kepentingan dan kebijakan luar negeri mereka. Dari aspek ekonomi, jelas bahwa segala kebutuhan yang memiliki kaitannya dengan kepentingan ekonomi dalam negeri seperti perdagangan dan investasi bisa dilaksanakan tanpa perlu adanya ketegangan.

Konstelasi Politik Timur Tengah Pasca Rekonsiliasi

Pada 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan dimulainya kembali hubungan diplomatik mereka dan pembukaan kembali kedutaan dalam waktu dua bulan, menyusul pembicaraan yang disponsori China di Beijing. Ini mengakhiri tujuh tahun kerenggangan politik di Teluk Persia (middleeastmonitor.com, 2023). Hal ini tentu saja dapat berimplikasi terhadap konstelasi politik di Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun permusuhan yang memicu konflik di Timur Tengah, Iran dan Arab Saudi setuju untuk mengakhiri keretakan diplomatik mereka dan membuka kembali misi diplomatik dalam kesepakatan penting yang difasilitasi oleh China. Arab Saudi dan Iran merupakan kekuatan Muslim Sunni dan Syiah yang dominan di Teluk menyepakati bahwa mereka akan meluncurkan pengaturan untuk membuka kembali kedutaan dan konsulat dalam periode dua bulan yang ditetapkan dalam kesepakatan (Orr & Yaakoubi, 2023).

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik telah mendapatkan momentum sejak kesepakatan Saudi-Iran yang ditengahi China untuk memulihkan hubungan (aljazeera.com, 2023). Pembentukan kembali hubungan diplomatik Saudi-Iran melalui mediasi China telah mengakibatkan gelombang kejut tektonik dalam lanskap geopolitik di sekitar kedua negara ini. Analisis awal, sebagian besar berfokus pada dampak langsung dari perkembangan ini dalam politik Teluk, dilihat dari

perspektif kepentingan kedua negara. Ada momentum baru dalam “Over the Counter” yang mengincar integrasi politik, ekonomi, dan strategis di dalam blok ini. Kemudian, pendalaman ikatan energi dan kebangkitan koridor tengah (dalam semangat Jalur Sutera lama) untuk hubungan ekonomi (Aras, 2023).

Baik Arab Saudi maupun Iran telah menyatakan kesediaan mereka untuk memilih jalur dialog. Ini berarti bahwa jika dua kelas berat regional memutuskan untuk memulai jalur dialog. Kesepakatan ini berbicara tentang dinamika internasional di kawasan Timur Tengah. Perjanjian tersebut didasarkan pada dua pilar, yaitu menghormati kedaulatan kedua negara dan mengaktifkan perjanjian kerja sama keamanan tahun 2001 antara kedua negara (Alghannam, 2023). Salah satu tujuan utama dari dialog yang dibangun kedua negara adalah untuk mengakhiri keretakan diplomatik dan membangun kembali hubungan setelah permusuhan bertahun-tahun yang telah membahayakan stabilitas regional termasuk di Yaman, Suriah, dan Lebanon. Kesepakatan itu juga menyoroti pengaruh China yang tumbuh di Timur Tengah (Benmansour, 2023).

Meskipun pentingnya membangun kepercayaan dan deeskalasi regional tidak dapat diremehkan, kenyataannya akan ada banyak kesinambungan dari perubahan dalam hubungan Saudi-Iran. Kesepakatan itu akan tetap rentan terhadap tantangan kompleks yang disebabkan oleh militerisasi semacam itu. Doktrin militer Iran dan Saudi serta rencana militer utama mereka tetap utuh yang berarti kekuatan militer kemungkinan akan tetap menjadi titik gesekan dengan potensi destabilisasi. Saudi akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan rudal dan anti-*drone* mereka bekerja sama dengan AS dan mitra lainnya. Iran telah lama memandang ini sebagai ancaman terhadap keseimbangan ofensif-defensif regional. Dengan demikian, Teheran kemungkinan akan melanjutkan upayanya dalam melancarkan tindakan balasan yang tepat, di antaranya meningkatkan kemampuan ofensif poros perlawanannya. Dalam

beberapa tahun terakhir, Iran telah memperkuat pangkalan militernya yang dekat dengan pantai Teluk Persia untuk meningkatkan kemampuannya melawan negara-negara pesisir Teluk Persia. Tren ini kemungkinan akan berlanjut juga dan berkontribusi pada pembelian senjata Saudi untuk menggagalkan ancaman Iran (Divsallar, 2023).

Konstelasi politik di timur Tengah pasca adanya rekonsiliasi Saudi-Iran sedikit banyak akan memengaruhi atensi dunia global. Hal ini karena Arab Saudi merupakan mitra utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Sedangkan Iran merupakan musuh AS yang kerap terlibat ketegangan dan pertempuran. Pada satu sisi, rekonsiliasi ini mengaktifkan kembali kesepakatan-kesepakatan antara kedua negara yang pernah dibuat. Kemudian, membuka jalan untuk laju perekonomian yang optimal. Namun di sisi lain kepentingan persenjataan dan pertahanan merupakan unsur penting kekuatan negara sekaligus merepresentasikan aliansinya. Dalam hal ini yang menarik adalah sikap Saudi yang kemudian bermain dua kaki kepada AS dan Iran. Saudi menyadari bahwa menjaga hubungan dengan AS adalah keharusan yang dipertahankan. Namun, merekonsiliasi hubungan dengan Iran juga sebagai jalan perdamaian yang memuluskan beberapa kepentingan di Timur Tengah. Sikap Iran dan Saudi akan memberi pengaruh kepada negara-negara afiliasi mereka seperti Suriah, Irak, Lebanon, UEA, Kuwait, dan lain-lain. Apabila Saudi-Iran dalam perdamaian, praktis aliansinya pun juga dapat meminimalisir pergesekan. Namun, apabila hubungan kedua negara ini merenggang bukan tidak mungkin ketegangan demi ketegangan di Timur Tengah kembali terjadi.

Kepentingan China dalam Rekonsiliasi Saudi-Iran

Setelah China berhasil menengahi kesepakatan untuk memulihkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, Beijing tampaknya akan mengambil peran lebih besar di Timur Tengah dan berpotensi menantang dominasi AS di kawasan kaya minyak tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai di

Beijing, Riyadh dan Teheran setuju untuk membuka kembali kedutaan mereka dan bertukar duta besar setelah tujuh tahun hubungan diplomatik dan ketegangan terputus. Kesepakatan itu merupakan kemenangan besar bagi diplomasi China. Hal tersebut juga menandai perubahan dalam strategi Beijing untuk tidak terlibat dalam perselisihan regional, dan dengan cerdas mendapat manfaat dengan eksistensinya tersebut. China telah mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang kuat dengan Riyadh dan Teheran dalam beberapa tahun terakhir. Arab Saudi adalah pemasok minyak terbesar China, dengan perdagangan antara kedua negara sebesar \$87 miliar (€81 miliar) pada tahun 2021. Perdagangan antara Iran dan China, sementara itu, bernilai lebih dari \$16 miliar pada tahun yang sama, dengan Teheran bergantung pada raksasa Asia sebanyak 30% dari perdagangan luar negerinya. China juga telah berjanji untuk berinvestasi \$400 miliar di Iran selama 25 tahun (Yang, n.d.).

China adalah elemen tak terduga untuk menjembatani kesenjangan antara kedua negara dan membawa pembicaraan di Beijing dengan pejabat senior kedua negara untuk mencapai kesepakatan dan pernyataan bersama. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan pencapaian diplomatik yang signifikan bagi China yang berupaya memperkuat pengaruhnya di kedua sisi Teluk, yaitu di Iran dan negara-negara Arab di wilayah tersebut (Shine, Guzansky, & Shavit, 2023). Di sisi lain, tindakan China ini juga dapat berimplikasi positif terhadap kepentingannya di Timur Tengah.

Kepentingan utama China terkait dengan dukungan prinsipnya terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial. China ingin mempromosikan sebagian besar kebijakan ini di *Middle East and North Africa* (MENA) melalui posisinya di Dewan Keamanan PBB. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan internasional yang lebih luas terhadap norma-norma ini. Misalnya, pada Juli 2019, banyak negara Barat mengkritik China karena mendirikan *kamp* pendidikan ulang di Xinjiang,

tetapi Iran, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Suriah, dan negara-negara MENA lainnya secara terbuka mendukung apa yang disebut Beijing sebagai upaya deradikalisasi di wilayah otonom tersebut. Apa yang tampak sebagai pertunjukan dukungan yang kuat untuk kedaulatan Tiongkok. Kemudian kepentingan China berkaitan dengan ikatan komersialnya yang meliputi energi, perdagangan, dan investasi. Pada pertengahan 2019, China telah menandatangani perjanjian dengan 21 negara MENA (termasuk 18 negara Arab) pada proyek bersama *Belt and Road Initiative* (BRI). Ambisi China yang semakin besar untuk memasukkan MENA ke dalam BRI baik untuk alasan ekonomi maupun strategis yang lebih luas membuat Beijing meningkatkan keterlibatannya secara signifikan dengan kawasan tersebut. Terakhir, China memiliki kepentingan diplomatik di MENA. Pada tahun 2016, ketika sengketa wilayah di Laut China Selatan semakin memanas, Liga Arab mendukung China melalui Deklarasi Doha. Organisasi tersebut berpihak pada posisi Beijing bahwa pihak yang berkonflik harus menyelesaikan perselisihan mereka secara bilateral tanpa keterlibatan negara asing atau organisasi internasional seperti Pengadilan Arbitrase Permanen. Dukungan dari 22 negara Arab mengurangi keterasingan dan rasa malu China di Asia Tenggara setelah pengadilan menolaknya atas sengketa tersebut. Untuk menjaga semua kepentingan ini, China mengandalkan empat langkah yaitu diplomasi mediasi; perluasan kemitraan politiknya dengan negara-negara MENA penting; pengerahan pasukan penjaga perdamaian; dan memperdalam kerja sama ekonomi (Lons, Fulton, Sun, & Al-Tamimi, 2019).

Secara khusus, kepentingan China untuk mencapai perdamaian antara Arab Saudi dan Iran adalah, yaitu (Shaher, 2023):

1. Kepentingan ekonomi yang besar antara China dan Arab Saudi dan Iran. Perjanjian ekonomi besar-besaran ditandatangani dengan Arab Saudi selama kunjungan Presiden China, sementara China menandatangani

perjanjian strategis dengan Teheran untuk jangka waktu 25 tahun.

2. Memastikan aliran minyak yang berkelanjutan dari Timur Tengah, yang menjamin kelancaran operasi produksi di China.
3. Keinginan China untuk menampilkan dirinya sebagai penjaga perdamaian di dunia, mengandalkan reputasi sejarahnya di mana ia tidak memiliki sejarah kolonial.
4. China mengejar kemitraan strategis lebih lanjut dengan negara-negara aktif di dunia, terutama Rusia, Iran, dan Arab Saudi, untuk melawan ancaman AS terhadap China.

Dalam banyak hal, kesepakatan Saudi-Iran bukanlah jumlah nol dan berbagai aktor yang terlibat mungkin ingin memainkan peran yang berbeda di masa mendatang. Bagi China, perannya dalam menengahi kesepakatan menandai perubahan yang semakin besar dalam persaingan kekuatan besar di Timur Tengah, di mana AS tetap terlibat namun perlu menekankan kembali kebijakan regionalnya. Baik Arab Saudi dan Iran menganggap China sebagai mediator yang lebih netral. Faktanya, China adalah mitra dagang terbesar kedua negara, sumber utama mata uang asing bagi Iran dan memiliki hubungan strategis baik dengan Riyadh maupun Teheran. Motif strategis China termasuk memastikan akses tanpa gangguan yang lebih besar ke minyak Saudi dan Iran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan geekonominya, terutama karena meningkatkan investasinya di pelabuhan Saudi di Laut Merah, khususnya Jeddah, untuk mendukung BRI (Jalal, 2023).

Dari uraian tersebut tergambar jelas kepentingan China dalam memediasi Saudi-Iran. China memiliki strategi politik dan diplomatik yang sangat baik. Pertama, China tidak ingin memihak kepada negara mana pun, dalam konteks ini Saudi-Iran. Hal tersebut dilakukannya untuk menjaga netralitas terhadap kedua negara yang merupakan mitra strategisnya.

Kedua, China berupaya menyaingi AS yang merupakan negara dengan dominasi besar di Timur Tengah dan mengganggu keamanan Beijing. Dengan memegang Saudi dan Iran, praktis China memegang dua kekuatan utama Teluk Persia. Hal ini tidak dimiliki oleh AS, karena Washington merupakan musuh Iran. Ketiga, untuk memuluskan kebijakan BRI yang menyasar kawasan MENA. BRI ini dicanangkan oleh China sebagai mega proyek untuk menguasai perekonomian dan pasar dunia. Strategi ini tentu saja akan menguatkan langkah China dalam mengembangkan sektor perekonomian, perdagangan dan investasi di timur Tengah tanpa khawatir akan ancaman AS di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran melalui mediasi China berhasil menyatukan kembali kedua negara yang sering terlibat ketegangan dalam waktu yang lama. Rekonsiliasi ini juga berdampak terhadap konstelasi politik di Timur Tengah yang mana negara-negara yang beraliansi dengan Saudi dan Iran akan lebih *soft* terhadap negara yang dianggap musuh. Hal ini karena dua kekuatan besar Timur Tengah telah menyepakati rekonsiliasi hubungan baru mereka untuk kepentingan keamanan, perekonomian dan perdamaian. Kemudian, sebagai aktor di balik kesuksesan rekonsiliasi Saudi-Iran, China tentu saja memiliki kepentingan-kepentingan yang memberikan manfaat bagi negaranya. Kepentingan tersebut yaitu dengan menyatukan kembali Saudi-Iran, China bisa lebih leluasa untuk menjalin kerjasama dengan kedua negara tersebut di bidang perekonomian dan investasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Teluk Persia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas dan energi yang dibutuhkan oleh China. Kemudian, strategi China untuk meraih dukungan di dunia internasional bisa semakin kuat berkat perannya di balik rekonsiliasi Saudi-Iran, dan sikapnya yang bermain politik dua kaki dengan tidak memihak kepada salah satu negara yang

terlibat konflik. Lalu, peluang China untuk menyaingi AS terbuka lebar. Di kawasan regional, China berhasil menunjukkan dirinya sebagai “juru damai” yang handal. Hal ini tentu memberikan pandangan positif dari negara-negara yang menginginkan perdamaian. Kemudian, dalam forum internasional, dukungan bagi China dari negara-negara Teluk Persia semakin kuat sehingga AS cukup kesulitan untuk mendiskreditkan China.

Daftar Rujukan

- Alghannam, H. (2023). Symposium on the Chinese-Brokered Iran-Saudi Deal. *The Institute for Peace & Diplomacy*, 1-23.
- aljazeera.com. (2023, April 8). *Saudi Foreign Ministry Says Delegation Arrives in Iran*. Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/8/saudi-foreign-ministry-says-delegation-arrives-in-iran>
- Aras, B. (2023). Saudi-Iranian Normalization and its Repercussions on Israel-Iran Confrontation (Restoration of Saudi-Iranian Ties: Wider Geopolitical Implications). *Gulf Studies Center Policy Brief*, 11, 1-10.
- Bakir, A. (2022). The Saudi – Turkish Normalization: Impact on ties with Iran? *CeSPI, Brief*, 47, 1-4.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-dasar hubungan internasional*. Depok: Kencana.
- Batrawy, A. (2023, Juny 6). *Iran Reopens its Embassy in Saudi Arabia as the Gulf Rivals Restore Ties*. Retrieved from npr.org: <https://www.npr.org/2023/06/06/1180157114/iran-reopens-embassy-in-saudi-arabia>
- Battaloglu, N. H. (2023). Saudi-Iranian Normalization and its Repercussions on Israel-Iran Confrontation. *Gulf Studies Center, Policy Brief*, 11, 1-10.
- Benmansour, M. (2023, June 6). *Iran's Embassy Reopens in Saudi Arabia for First Time in Seven Years*. Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-embassy-reopens-saudi-capital-riyadh-al-arabiya-tv-2023-06-06/>
- Castro, R. (2023). How a Saudi-Iranian Reconciliation Aids Israel. *BESA Center Perspectives Paper*, 192(2), 1-3.

- crisisgroup.org. (n.d.). *How Beijing Helped Riyadh and Tehran Reach a Detente*. Retrieved from crisisgroup.org: <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa-saudi-arabia-iran-china/how-beijing-helped-riyadh-and-tehran-reach-detente>
- Divsallar, A. (2023). Symposium on the Chinese-Brokered Iran-Saudi Deal. *The Institute for Peace & Diplomacy*, 1-23.
- Dormer, R. (2017). The Impact of Constructivism on International Relations Theory: A History. *Social Sciences Review*, 22, 51-64.
- en.mfa.ir. (n.d.). *Foreign Ministers of Iran, Saudi Arabia Hold Phone Conversation*. Retrieved from en.mfa.ir: <https://en.mfa.ir/portal/newsview/719746/Foreign-Ministers-of-Iran-Saudi-Arabia-hold-phone-conversation>
- en.mfa.ir. (n.d.). *Foreign Ministers of Iran, Saudi Arabia Hold Positive Meeting*. Retrieved from en.mfa.ir: <https://en.mfa.ir/portal/newsview/716483/Foreign-Ministers-of-Iran-Saudi-Arabia-hold-positive-meeting>
- fmprc.gov.cn. (2023, March 11). *Joint Trilateral Statement by the People's Republic of China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the Islamic Republic of Iran*. Retrieved from fmprc.gov.cn: https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202303/t20230311_11039241.htm
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security*, 23(1), 171-200.
- Houghton, B. (2022). China's Balancing Strategy Between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh. *Asian Affairs*, 53(1), 124-144. doi:10.1080/03068374.2022.2029065
- indonesia.cri.cn. (2023, April 11). *Perubahan Signifikan Situasi Timur Tengah Pasca Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran di Beijing*. Retrieved from Indonesia.cri.cn: <https://indonesian.cri.cn/2023/04/11/ARTIo1sqDCvFBNfYM70R2Wq9230411.shtml>

- Jalal, I. (2023, April 5). *China and the Saudi-Iran Rapprochement: Implications for Yemen*. Retrieved from mei.edu: <https://www.mei.edu/publications/china-and-saudi-iran-rapprochement-implications-yemen>
- Litvak, M. (2017). Iran and Saudi Arabia: Religious and Strategic Rivalry. *Begin-Sadat Center for Strategic Studies*, 49-54.
- Lons, C., Fulton, J., Sun, D., & Al-Tamimi, N. (2019). China's Great Game in the Middle East. *Policy Brief*, 1-33.
- Machmudi, Y. (2020). *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- middleeastmonitor.com. (2023, April 18). *Diplomat: Iran, Saudi Arabia to Reopen Embassies by 9 May*. Retrieved from Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20230418-diplomat-iran-saudi-arabia-to-reopen-embassies-by-9-may/>
- middleeastmonitor.com. (2023, April 28). *Iran Foreign Minister Says Embassies in S. Arabia, Iran to Open 'Within Days'*. Retrieved from Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20230428-iran-foreign-minister-says-embassies-in-s-arabia-iran-to-open-within-days/>
- Oktorino, N. (2015). *Konflik Bersejarah: Pedang Sang Khalifah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Orr, B., & Yaakoubi, A. E. (2023, April 6). *Top Iranian, Saudi Envoys Meet in China in Restoration of Diplomatic Ties*. Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/world/foreign-ministers-iran-saudi-meet-china-2023-04-06/>
- Raco, J. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sari, I. (2023). The Impact of the Iran-Saudi Arabia Deal on the Middle East: A New Wave of Regional Normalization? *Orsam Analysis*, 312, 1-24.
- Shaher, S. A. (2023, April 9). *How did Beijing Succeed in Achieving the Saudi-Iranian Reconciliation?* Retrieved from moderndiplomacy.eu:

- <https://moderndiplomacy.eu/2023/04/09/how-did-beijing-succeed-in-achieving-the-saudi-iranian-reconciliation/>
- Shine, S., Guzansky, Y., & Shavit, E. (2023). Iran and Saudi Arabia Renew Relations. *Institute for National Security Studies, 1695*, 1-5.
- Sinha, A. (2023, April 3). *Saudi-Iran Deal and China's Growing Influence in the Middle East*. Retrieved from The Kootneeti.in: <https://thekootneeti.in/2023/04/03/saudi-iran-deal-and-chinas-growing-influence-in-the-middle-east/>
- spa.gov.sa. (n.d.). *Chinese Senior Diplomat: Resumption of Relations Between Saudi Arabia and Iran is 'Victory' for Peace*. Retrieved from spa.gov.sa: <https://www.spa.gov.sa/en/89d1471e9bn>
- Theys, S. (2018, February 23). *Introducing Constructivism in International Relations Theory*. Retrieved from e-ir.info: <https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/pp-1-4>
- Walt, S. M. (n.d.). *Significance of the Iran-Saudi Arabia Agreement Brokered by China*. Retrieved from belfercenter.org: <https://www.belfercenter.org/publication/significance-iran-saudi-arabia-agreement-brokered-china>
- Wicaksana, I. G. (2016). Konstruktivisme. In V. Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik* (pp. 102-167). Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Yang, W. (n.d.). *Iran-Saudi deal: China's growing clout in the Middle East*. Retrieved from dw.com: <https://www.dw.com/en/iran-saudi-deal-chinas-growing-clout-in-the-middle-east/a-64983922>
- Zaaimi, S. (n.d.). *Is Saudi-Iran Reconciliation Threatening the Future of Israeli Normalization?* Retrieved from Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/is-saudi-iran-reconciliation-threatening-the-future-of-israeli-normalization/>